

### **BAB III**

## **DINAMIKA PERJALANAN PABRIK GULA SUMBERHARJO**

#### **A. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Tahun 1985-2005**

Sejak dasawarsa 1990-an negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali di negara maju disibukkan dengan proyek penataan kembali pengelolaan ekonomi di dalam negeri. Kondisi di negara maju, restrukturisasi perekonomian difokuskan kepada upaya untuk membangun hubungan keuangan intrapemerintahan agar bisa mengimbangi perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks. Berbeda dengan negara yang sedang menjalani proses transisi ekonomi seperti Eropa Timur dan Eropa Tengah, sedang giat-giatnya membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di luar itu, banyak negara berkembang lain juga berpikir keras untuk melakukan desentralisasi fiskal sebagai salah satu jalan meloloskan diri dari berbagai jebakan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makro ekonomi, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi yang telah menyebabkan negara-negara itu jatuh terperosok di tahun 1998.<sup>1</sup>

Dalam dasawarsa terakhir abad ke 20 peranan ekonomi pertanian sebagai sumber penghasilan dan pekerjaan lebih merosot lagi, dan kecenderungan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengabaikan

---

<sup>1</sup> Ahmad Erani Yustika, *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 2.

bidang yang selama itu menjadi sektor utama.<sup>2</sup> Dalam hal ini komentar

Booth relevan untuk disinggung:

sejak tahun 1987 sektor manufaktur dan moderen telah menjadi mesin pokok pertumbuhan ekonomi Indonesia: sektor pertanian mendapat prioritas kedua dalam debat tentang kebijakan, dan jatah sumber anggarannya terus menurun.

Berbagai kebijakan yang berkaitan industri pergulaan nasional telah dikeluarkan pemerintah baik sebelum masa krisis moneter (1988-1997) maupun setelah krisis moneter (1998-2004). Bahkan tidak kurang 24 (dua puluh empat) kebijakan pemerintah telah dikeluarkan selama periode 1998-2004. Salah satu perusahaan gula yang ikut dikenakan pada kebijakan pemerintah ini adalah pabrik gula Sumberharjo yang terletak di desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang. Lingkungan pabrik gula Sumberharjo adalah lingkungan pemukiman dan pertanian.

Dinamika perjalanan pabrik gula Sumberharjo dari kurun waktu tahun 1985-2005 adalah tetap. Pabrik gula Sumberharjo secara produktivitas itu standar atau bisa dibilang stagnan. Artinya kuintal tebu rata-rata itu tidak mengalami peningkatan, walaupun mengalami Peningkatan namun tidak mempengaruhi atau tidak signifikan, sedangkan biaya tenaga kerja setiap tahun naik. Jadi antara produktivitas dan biaya tenaga kerja apabila digambarkan dalam kurva itu untuk produktivitas adalah lurus (horisontal) dan untuk biaya tenaga kerja itu meningkat (diagonal). Pabrik gula mendapat laba dari penjualan gula atau harga gula yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jan Breman dan Gunawan Wiradi, *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa: Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20*, Jakarta: LP3ES, 2002, hlm. 10.

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Muhammad Nurharyanto, pada tanggal 12 Desember 2012 di kantor Administrasi Pabrik Gula Sumberharjo Pemalang.

Wilayah kerja pabrik gula Sumberharjo di kabupaten Pemalang meliputi kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan dan Randudongkal. Kabupaten Purbalingga meliputi desa Karang Anyar dan Kabupaten Tegal meliputi Warureja. Wilayah kerja itu dibagi 3 Rayon (*Afdeling*) yaitu: Rayon Barat, Rayon Tengah dan Rayon Timur. Rayon Barat meliputi 12 desa: Banjarturi, Banjaragung, Kedung Kelor, Demangharo, Ranimulya, Warureja, Sukareja, Kedayakan, Demang, Kedungjati, Sigentong, Sidamulya. Rayon Tengah meliputi: Banjarmulya, Wanamulya, Kramat, Sewaka, Bojongbata, Bojongnangka, Tambakreja, Kebondalem, lawangreja, Saradan, Surajaya, Paduraksa, Pegongsoran, Widuri, Danasari, dan Sugihwaras. Sedangkan Rayon Timur meliputi: Banjaran Jelagah, Siran, Pedurungan, Beji, Gondang, Sukowangi, Pener, Kendalsari dan karang Anyar.<sup>4</sup>

Perkembangan pabrik gula Sumberharjo sudah tidak diragukan lagi keeksistensiannya, buktinya pabrik ini masih aktif menggiling dari zaman kolonial belanda hingga sekarang. Walaupun pada masa pendudukan Jepang pabrik gula ini sempat diambil alih oleh pemerintah Jepang, bahkan telah dialihfungsikan menjadi tempat untuk memproduksi semen yang kesemuanya itu adalah demi memenuhi kepentingan dari pemerintah Jepang. Dampak yang ditimbulkan dari pengalihan fungsi pabrik gula Sumberharjo adalah kerusakan.

---

<sup>4</sup> Diambil dari penulisan Galih Widyatmoko, *Kegiatan Pengadaan Areal Tebu Melalui Sistem Kemitraan dan Pengelolaan KBD (Kebun Bibit Datar) di Pabrik Gula Sumberharjo, Kabupaten Pemalang*, Yogyakarta: Jurusan Ekonomi Pertanian UGM, 2006, hlm. 10.

Melihat sejarah pabrik gula Sumberharjo di zaman pendudukan bala tentara Jepang memang sangat disayangkan kemudian di zaman revolusi kemerdekaan nasional mengalami kerusakan berat. Kerusakan itu tidak hanya menyangkut gedung pabrik gula beserta alat-alat dan mesin-mesin penggilingnya, tetapi juga mengenai prasarana sosial dan ekonomi umum yang diperlukan untuk melestarikan industri ini di tengah-tengah ekonomi nasional Indonesia.

Sewaktu Republik Indonesia diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu pada akhir tahun 1949 semua pabrik gula yang masih ada dan dikuasai oleh pemerintah RI secara resmi diakui sebagai milik pihak Belanda. Pada tahun 1959, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan milik pihak Belanda lainnya yang berada di Indonesia, pabrik-pabrik gula dengan seluruh usahanya diambil alih oleh pemerintah RI dan dijadikan milik negara. Sejak saat itu pabrik-pabrik gula yang jumlahnya menyusut dari 179 sebelum perang dunia kedua menjadi 56 pada tahun 1983 dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan milik negara dalam bentuk PNP (Perusahaan Negara Perkebunan), atau dalam bentuk non PNP/PTP seperti misalnya pabrik gula Sumberharjo, Banjarmulya Pemasang.

Pabrik gula Indonesia, khususnya pabrik gula Sumberharjo tetap eksis membuat dinamika sejarah sosial ekonomi, perkembangannya juga mengalir sesuai kebijakan-kebijakan dari pemerintah Indonesia. Meskipun kebijakan-kebijakan dari pemerintah sering kali tidak menguntungkan pabrik gula sendiri. Contohnya yaitu kebijakan tahun 1998 mengenali anti monopoli

yang ternyata merugikan pabrik gula Sumberharjo, meskipun para petani mendapatkan keuntungan yang lebih.

Sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor utama dalam perekonomian Indonesia dan kedepan akan terus menjadi sektor penting dalam hal pengentasan kemiskinan, kesempatan kerja, pendapatan nasional, penerimaan ekspor dan keterkaitan dengan sektor industri dan jasa. Dengan perannya tersebut, sektor pertanian di Indonesia selalu menjadi perhatian pemerintah. Salah satu perhatian yang diberikan adalah pemerintah menerapkan kebijakan intervensi langsung dan tidak langsung terhadap subsektor perkebunan dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan di bidang produksi, perdagangan dan makroekonomi untuk memberi insentif dan perlindungan terhadap subsektor perkebunan.<sup>5</sup>

Menurut Sri Wahyuni, Supriyati dan J.F Sinuraya dalam penulisannya mengategorikan kebijakan pemerintah yang mencangkup masa tahun 1985-2005 ke dalam 3 kategori. Kebijakan-kebijakan pemerintah tahun 1985-sekarang dapat dikategorikan dalam tiga rezim tersebut meliputi: Rezim Kebijakan Stabilitas (1971-1996), Rezim Perdagangan Bebas (1997-2001), dan terakhir adalah Rezim Kebijakan Terkendali (2002-sekarang).

### **1) Rezim Kebijakan Stabilitas (1971-1996)**

Awal tahun 1970-an terjadi kenaikan harga gula di pasar dunia terkait dengan kegagalan tanaman bit di Rusia dan Eropa Timur. Kondisi ini

---

<sup>5</sup> Bambang Drajat, "Dampak Intervensi Pemerintah Terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Perkebunan Utama pada Berbagai Rezim Nilai Tukar Rupiah 1979-2005, *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 27 No 1 Edisi Mei, 2009 hlm.62.

memotivasi peningkatan produksi gula di Indonesia. Pada periode ini kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat intensif baik pada sisi produksi, distribusi dan harga.<sup>6</sup>

Sebagai langkah awal, pemerintah mengeluarkan Keppres No.43/1971 yang pada dasarnya memberi wewenang kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan gula pasir. SK ini menandai era dimulainya peran Bulog sebagai lembaga stabilisator, Keppres No.43/1971 juga berisi pembubaran sistem sindikat gula serta mengatur pembagian tugas dan wewenang instansi terkait dalam industri gula secara rinci, dimana Departemen Pertanian bertanggungjawab atas produksi.<sup>7</sup> Program stabilisasi harga yang dilakukan bulog periode 1971-1975 terbukti berhasil. Setelah bulog menjadi satu-satunya lembaga yang menguasai pasokan gula, baik produksi dalam negeri maupun impor. Stabilisasi harga dapat berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

Pada Era ini salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan produksi gula di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 9 tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat. Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI) adalah perusahaan tanaman tebu rakyat yang diatur sebagai salah satu program

---

<sup>6</sup> Sri Wahyuni, Supriyati dan J.F Sinuraya, *Industri dan Perdagangan Gula Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Penjajahan-Sekarang*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, hlm. 139.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>8</sup> Khudori, *Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 51.

intensifikasi pertanian dengan pola Intensifikasi khusus (Insus), yaitu intensifikasi yang dilakukan dalam kaitan kerjasama kelompok tani pada satu hamparan usaha tani guna memanfaatkan potensi lahan, daya dan dana secara optimal dengan menerapkan teknologi anjuran adapun tujuan dari Inpres tersebut adalah:

1. Mengalihkan pengusahaan tebu yang semula berada di tangan pabrik gula dengan sistem sewa, ke tangan petani yang harus mengusahakan sendiri tanaman tebu di atas lahannya sendiri.
2. Memperbaiki penghasilan petani tebu dengan meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan usaha tani yang lebih intensif.
3. Tercapainya pemantapan dan peningkatan produksi gula.

Tujuan akhir sistem Tebu Rakyat Intensifikasi adalah membuat petani tebu menjadi “wiraswasta” yang mampu berusaha dan berdiri sendiri, dan dapat menghadapi pabrik serta pedagang gula atau sektor swasta pada umumnya. Namun sistem TRI telah membawa masalah, antara lain terhadap pendapatan petani, kedadann pabrik gula dan terhadap organisasi serta kelompok petani. Sistem ini juga menurunkan produksi gula total.<sup>9</sup> Menurut Mubyarto, untuk mendukung program pembangunan industri gula, sistem ini perlu ditata lagi sehingga kegairahan petani dan pabrik-pabrik gula dapat ditimbulkan kembali. Meskipun demikian, menurut berbagai sumber dari arsip daerah

---

<sup>9</sup> Mubyarto, “Tebu Rakyat Intensifikasi: Prospek dan masalahnya”. *Jurnal Prisma*, NO.10 Edisi Oktober, 1981, hlm. 50.

Pemalang, sistem TRI yang diberlakukan sejak tahun 1975 masih tetap saja eksis sampai abad ke 20'an. Karena disadari atau tidak, ada dan diberlakukannya program TRI menjadikan petani bersama-sama dengan pabrik gula memegang peranan yang cukup penting dalam industri gula.

Dari sisi kebijakan produksi dan kebijakan input, kebijakan yang paling signifikan dari pemerintah pada periode stabilitas adalah kebijakan TRI yang telah tertuang dalam Inpres No.9/1975, pada tanggal 22 April 1975. Esensi dari kebijakan tersebut adalah membuat para petani menjadi manajer pada lahannya sendiri dengan dukungan pemerintah melalui kredit BIMAS, bimbingan teknis, perbaikan sistem pemasaran dengan melibatkan KUD serta menciptakan suatu hubungan kerjasama antara petani tebu dengan pabrik gula.<sup>10</sup>

Usaha untuk menjaga ketersediaan bahan baku tebu dan terkendalanya areal tebu di lahan sawah, mulai tahun 1980 dikembangkan tebu di daerah lahan kering. TRI membawa konsekuensi perubahan tata ekonomi di pedesaan, baru pada tahun 1981 areal tebu di Jawa berhasil di dominasi oleh tebu rakyat yang mencapai 80 % dari total areal tebu. Namun ternyata program TRI kurang berhasil dalam peningkatan produksi gula produksi pada periode tahun 1975-1980 lebih rendah dibandingkan dengan periode tahun 1970-1975 disebabkan karena penurunan produktivitas.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sri Wahyuni, *op.cit.*, hlm. 140.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 141.



Adanya perubahan dari sistem sewa ke sistem Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), kedudukan pabrik-pabrik gula berubah fungsinya. Pabrik gula yang tadinya merupakan perusahaan perkebunan mengalami perubahan menjadi sebatas mesin atau perusahaan penggiling tebu saja. Pemerintah pada keputusan inpres No 9 menyiratkan bahwa, sistem sewa adalah sistem peninggalan zaman kolonial yang tidak mendidik petani untuk mampu berdiri sendiri.<sup>12</sup> Petani harus menjadi pengelola miliknya sendiri atau *land for the tillers*. Sebaliknya pabrik-pabrik gula dianggap sebagai alat kolonial untuk mengeksploitasi lahan pertanian dan buruh yang murah di Jawa dalam usaha menghasilkan keuntungan besar bagi pemilik-pemilik modal dari negeri Belanda.

Program TRI melibatkan beberapa lembaga dalam pelaksanaannya, yang masing-masing berfungsi sebagai pelaksanaan, pelayaran, pembinaan, dan koordinasi. BRI yang berfungsi sebagai lembaga yang memberikan kredit, menyalurkan kredit kepada KUD untuk diteruskan kepada petani dan bertanggung jawab dalam pengembaliannya, penyalur sarana produksi, melaksanakan pendaftaran peserta TRI, dan pembina kelompok tani.

Tulisan dari Henri Logaritma mengatakan bahwa lahan yang dipergunakan untuk menanam tebu berupa lahan sawah dan lahan tegalan, baik yang diusahakan sendiri oleh PG Sumberharjo maupun lahan petani yang mengikuti program TRI. Perkembangan luas areal tebu

---

<sup>12</sup> Mubyarto, *op.cit.*, hlm. 55.

mulai tahun 1992 sampai tahun 1996 termasuk juga perkembangan tingkat kontribusi jenis lahan tebu . Perkembangan luas areal tebu masa taman tebu tahun 1992-1996 dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

Tabel 7  
Perkembangan Areal Tanaman Tebu di Wilayah Kerja PG Sumberharjo,  
MTT 1992/1993 – 1996/1997

| Kategori       | 1992/1993            | 1993/1994            | 1994/1995            | 1995/1996            | 1996/1997            |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ex Bibit       | 4,589                | 43,837               | 6,128                | 0,860                | -                    |
| TSS            | 69,288               | 308,503              | 329,389              | 269,682              | 995,973              |
| TST            | 258,463              | 182,681              | 195,787              | 351,215              | 266,770              |
| $\Sigma$ TS    | 332,340<br>(7,56)    | 535,021<br>(14,55)   | 525,176<br>(14,28)   | 620,897<br>(17,55)   | 1.262,743<br>(43,38) |
| TRIS K         | 2.486,514            | 2.408,135            | 2.521,046            | 2.427,032            | 1.172,391            |
| TRIS N         | 3,014                | 16,232               | 24,935               | 36,286               | 7,842                |
| TRIS P         | -                    | -                    | -                    | -                    | 7,776                |
| TRIS<br>PK/KS  | 512,684              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| $\Sigma$ TRIS  | 3.002,212<br>(68,37) | 2.424,367<br>(65,91) | 2.545,981<br>(69,20) | 2.463,318<br>(69,65) | 1.188,009<br>(40,81) |
| TRIT K         | 781,754              | 681,01               | 590,347              | 420,181              | 400,148              |
| TRIT N         | 36,367               | 20,438               | 17,427               | 16,146               | 18,709               |
| TRIT P         | -                    | -                    | -                    | -                    | 41,408               |
| TRIT<br>PK/KS  | 238,777              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| $\Sigma$ TRIT  | 1.056,898<br>(24,07) | 701,448<br>(19,07)   | 607,774<br>(16,52)   | 436,327<br>(12,34)   | 460,265<br>(15,81)   |
| TR PG          | -                    | 17,465               | -                    | 16,427               | -                    |
| Lain           |                      |                      |                      |                      |                      |
| $\Sigma$ Total | 4.391,450            | 3.678,301            | 3.678,931            | 3.536,969            | 2.911,017            |

Sumber : Laporan Bagian Tanaman PG Sumberharjo

|       |            |  |
|-------|------------|--|
| Ket : | TSS        | : Tebu sendiri sawah   |
|       | TST        | : Tebu sendiri tegalan   |
|       | TRISK      | : Tebu rakyat intensifikasi sawah kredit                               |
|       | TRITK      | : Tebu rakyat intrnsifikasi tegalan kredit                             |
|       | TRISN      | : Tebu rakyat intensifikasi sawah non kredit                           |
|       | TRITP      | : Tebu rakyat intensifikasi tegalan kredit parsial                     |
|       | TRIS PK/KS | : Tebu rakyat intensifikasi sawah pola khusus/<br>kerjasama            |
|       | ( )        | : merupakan kontribusi terhadap luas total, dinyatakan dalam<br>persen |

Pada MTT 1996/1997 Peningkatan lahan pabrik gula Sumberharjo cukup besar dan mempunyai kontribusi paling banyak terhadap luas keseluruhan areal tanaman tebu. Peningkatan lahan yang diusahakan sendiri oleh pabrik gula tersebut disebabkan adanya upaya dari pihak pabrik gula untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku tebu akibat dari penurunan luas lahan tebu yang diusahakan petani. Dari dalam tabel dapat dilihat luas areal dan jenis pengusahaan lahannya. Terbaca untuk TRI lahan sawah lebih banyak dilaksanakan dari pada TRI tegalan.

Lahan milik pabrik gula sendiri memiliki kontribusi rata-rata 19,46% terhadap luas total dan kontribusi ini justru mengalami peningkatan sebesar 8,96 % pertahunnya. Kemudian luas lahan TRIS yang diusahakan oleh petani rata-rata sebesar 62,79% dan dapat dilihat perkembangannya dari tahun 1992/1993-1996/1997 mengalami penurunan. Walaupun terdapat kenaikan di tahun 1994/1995 namun

hal ini tidak terlalu signifikan dan cenderung turun 6,9% per tahunnya. Lahan TRIT mempunyai kontribusi sebesar 17,56% dari total lahan tebu yang juga mengalami penurunan sebesar 2,07% per tahun.

Tabel 8  
Produksi Tanaman Tebu (Ton) Tahun 1992-1996

| <b>PRODUKSI (Ton)</b> |           |           |             |            |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|------------|
| <b>TAHUN</b>          | 1992      | 1993      | 1994        | 1996       |
| <b>TOTAL</b>          | 42.992,00 | 37.015,00 | 411.236,98  | 280.377,91 |
| <b>Kenaikan (%)</b>   | -         | -13,90    | <b>1011</b> | -31,82     |

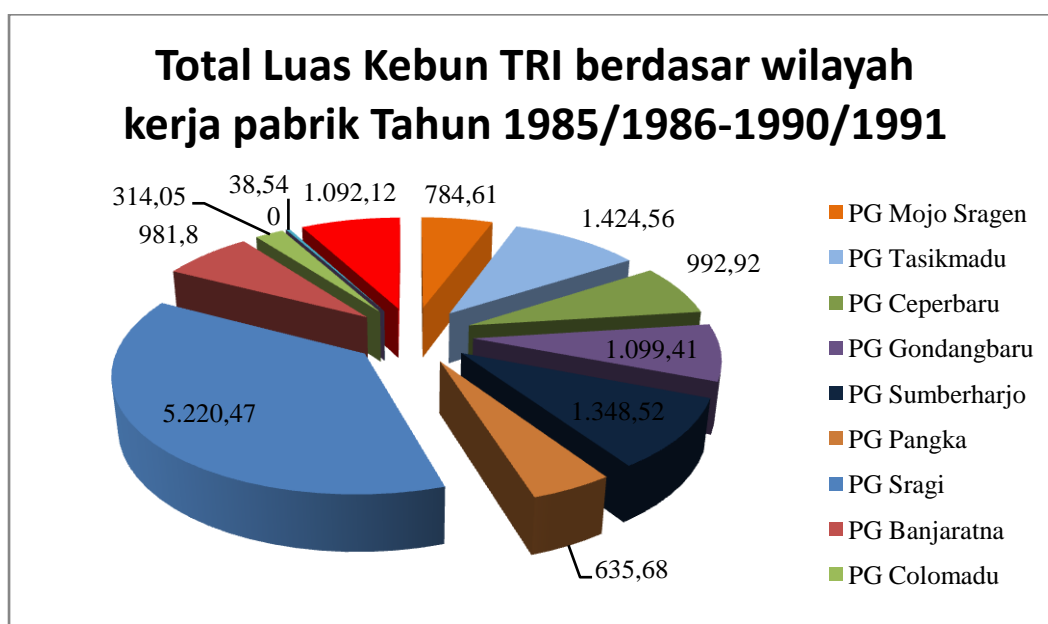
Sumber: BPS Pemalang, diolah dari BPS Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang dalam Angka 1992,1994,1996

Produksi tebu dari tahun 1992 mengalami penurunan sebesar 13,90% dan tahun 1994 meningkat drastis di tahun 1994 sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali sebesar 31,82%. Perkembangan produksi pabrik gula Sumberharjo juga dapat dilihat dari dalam tabel lampiran menunjukkan jumlah dan luas kebun TRI, TRIS maupun TRIT Pada semua kategori tanaman di berbagai pabrik gula seluruh Jawa Tengah dan DIY yang menghasilkan kristal lebih dari 10 ton per hektar selama 6 tahun yakni tahun 1985/1986 sampai dengan 1990/1991.

Terdapat 10 pabrik gula yang selama 6 tahun berturut-turut selalu mempunyai kebun TRT yang menghasilkan kristal lebih dari 10 ton per hektar. 2 pabrik gula hanya 5 kali selama 6 tahun, 2 pabrik gula hanya 4 kali dalam 6 tahun sedangkan sisanya terdapat 1 pabrik gula hanya 2 kali dan 1 pabrik gula sama sekali tidak pernah. Sepuluh

pabrik gula yang secara rutin selalu mempunyai kebun baru yakni pabrik gula Sragi, Sumberharjo, Pangka, Jatibarang, Banjarnegara, Trangkil, Pakis Baru dan pabrik gula Madukismo. Dua pabrik yang hanya 5 kali selama 6 tahun adalah pabrik gula Tasikmadu dan pabrik gula Cepiring.<sup>13</sup> Berikut adalah cart perbandingan perkembangan total lahan pabrik gula Sumberharjo dengan pabrik gula yang lainnya di tahun 1985/1986-1990/1991:

Gambar 1  
Total Luas Kebun TRI Berdasar wilayah kerja pabrik se Jawa-Tengah



Sumber: Windhiarto dan Wahyu Setyorini

## 2) Rezim Perdagangan Bebas (1997-2001)

Pada tahun 1997 kebijakan dari pemerintah lebih dikenal dengan istilah demonopoli gula yang mulai berlaku tahun 1998. Pada tahun 1998

<sup>13</sup> Windiharto dan Wahyu Setyorini, "Penelitian Perkembangan Perkebunan Gula Indonesia: Sugar Research Institute". *Berita*, No.10 ,Desember 1993, hlm. 53.

ini, telah dilakukan pembebasan tataniaga gula putih yang merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan *Internasional Monetary Fund* (IMF). Pada kondisi ini produksi gula putih dalam negeri semakin berkurang dan impor dari berbagai negara semakin meningkat.<sup>14</sup>

Instruksi Presiden No.9 Tahun 1975 dikoreksi kembali setelah mendapat sorotan tajam dari IMF. Gula sebenarnya milik petani tebu, tetapi karena peraturan presiden no.9 itu maka tebu harus dijual ke bulog yang dapat memasarkan sejak 1975. Tetapi terhitung 15 Januari 1998 Bulog terkena demonopoli pembelian/pemasaran gula petani tebu.<sup>15</sup>

Gambaran keadaan para petani tebu kala itu lain sekali dari lukisan petani padi. Petani tebu tak sepenuhnya memahami apa yang terjadi dengan tebunya sampai menjadi gula, mereka tampak buta mengenai kaitan budidaya dengan rendemen gula dan tak sepenuhnya tahu apa saja yang dihasilkan dari tebu.<sup>16</sup> Langkah kebijakan pemerintah yang sejalan dengan pemangkasan regulasi tertuang dalam Kepres no 19 tahun 1998 tentang perubahan atas keputusan presiden No.50 tahun 1995

---

<sup>14</sup> Lely Pelitasari S, "Industri Gula Rafinasi di Indonesia; Analisis Struktur Pasar dan Kebijakan". *Majalah Pangan*, nomor 46/xv/Januari,2006, hlm. 72.

<sup>15</sup> Padi juga pernah mengalami hal demikian. Waktu itu petani menyerahkan padinya ke kilang beras. Mereka tidak diijinkan mencermati proses penggilingan. Muncullah kecurigaaan kuat atas adanya permainan rendemen dan mutu beras. Untuk melindungi petani padi, pemerintah merombah tata cara memproses padi. Alat pemroses padi sekala kecil yang dikenal dengan *rice huller*. Pemerintah menyediakan kredit bagi petani perorangan atau kelompok yang mau memiliki dan menggunakan *rice huller*. Kampanye itu berhasil mematahkan monopoli kilang beras.

<sup>16</sup> Goeswini Soepardi, *Demonopoli Gula Petani Tebu*, Jakarta: (Kompas: Sabtu 7 Maret 1998), hlm. 5.

tentang badan urusan logistik sebagaimana telah diubah dengan kepres no 45 tahun 1997.<sup>17</sup>

Dengan kelembagaan seperti diatas hasil sukses telah dicapai, misal harga gula antar waktu stabil di tingkat eceran dan perbedaan harga eceran antarkota kecil. Hal ini disebabkan dengan monopoli bulog, dapat diatur penjualan gula antar waktu sehingga harga gula tidak jatuh pada musim panen dan tidak membumbung tinggi pada waktu paceklik. Disamping itu bulog dapat merencanakan dan mengatur subsidi silang sehingga biaya transpor pada daerah yang terpencil dapat disubsidi dari biaya transpor pada daerah yang dekat dengan produsen gula (pabrik).<sup>18</sup> Kestabilan harga gula di tingkat eceran untuk konsumen yang terdapat pada wilayah Pemalang tergolong stabil.

Seperti yang tergambarakan pada tabel dibawah ini, terinci rata-rata harga eceran gula pasir di Kabupaten Pemalang di tahun 1995 sebesar Rp 1.404,00 per kilogram dan Rp 1.467,00 per kilogram di tahun 1996 dan 1997. Walaupun harga gula mengalami kenaikan namun kenaikan itu tidak seberapa besarnya, dan bisa dikatakan masih stabil. Harga gula tingkat eceran di Pemalang dalam masing-masing bulan dapat dilihat secara rinci pada tabel 9.

---

<sup>17</sup> Nahdodin, *Pasar Gula Pasca Demonopoli*, Jakarta: (Kompas: Sabtu 7 Maret 1998), hlm. 7.

<sup>18</sup> Nahdodin adalah ketua kelompok peneliti sosial ekonomi dan ahli peneliti madya pada P3GI Pasuruan.

Tabel 9  
Rata-Rata Harga Eceran Gula Pasir di Kabupaten Pemalang  
Tahun 1995-1997 (Rp./Kg)

| Bulan               | Tahun |      |      |
|---------------------|-------|------|------|
|                     | 1995  | 1996 | 1997 |
| Januari             | 1250  | 1400 | 1500 |
| Februari            | 1300  | 1500 | 1500 |
| Maret               | 1400  | 1400 | 1400 |
| April               | 1500  | 1400 | 1500 |
| Mei                 | 1600  | 1500 | 1600 |
| Juni                | 1500  | 1500 | 1500 |
| Juli                | 1400  | 1500 | 1500 |
| Agustus             | 1400  | 1500 | 1500 |
| September           | 1350  | 1500 | 1600 |
| Oktober             | 1350  | 1400 | 1500 |
| November            | 1400  | 1500 | 1600 |
| Desember            | 1400  | 1500 | 1500 |
| rata-rata           | 1404  | 1467 | 1467 |
| kanaikan dalam<br>% |       | 4,29 | 0    |

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, dari Indikator Ekonomi Kabupaten Pemalang 1997, hlm. 4

Namun demikian kelembagaan diatas mendorong adanya *pungutan* serta jual beli lisensi pemasaran sehingga sistem pemasaran gula menjadi tidak efisien. Hal ini terlihat dari margin pemasaran harga eceran dikurangi harga (*provenue*<sup>19</sup>) gula yang tinggi. Di indonesia margin ini 40 persen dan sangat tinggi bila dibandingkn dengan negara

---

<sup>19</sup> Provenue diambil dari bahasa Belanda, dalam bahasa Inggris disebut producer get price dan dalam bahasa Indonesia disebut harga jual pabrik atau petani. Istilah provenue hanya dikenal di Indonesia sebab hanya Indonesia yang memiliki Lembaga Badan Urusan Logistik (Bulog), tugas pokoknya melakukan stabilisasi harga. Sumber: kamus istilah ekonomi populer.



lain yang melaksanakan sistem pemasaran gula yang lebih bersaing. Inilah yang menurut IMF tidak efisien dan karena itu perlu dipangkas.

Sebelum monopoli Bulog dihapus pada tahun 1998, harga gula di pasar domestik sejak awal tahun 1980-an relatif stabil. Komponen harga yang menjadi dasar bagi penentuan harga tebu yang dijual petani adalah *provenue* gula. Sayangnya, lewat intervensi negara meskipun nilai nominalnya terus naik, akan tetapi nilai harga *provenue* gula cenderung menurun.<sup>20</sup>

### 3) **Rezim Kebijakan Terkendali (2002-Sekarang)**

Ketika harga gula domestik terus merosot dan industri gula sudah diambang kebangkrutan kemudian tekanan produsen (Pabrik Gula dan Petani) semakin kuat. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan impor, dengan membatasi importir hanya menjadi importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT). Kebijakan ini tertuang dalam Kepmenperindag No.643/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002. Era ini merupakan periode dimulainya rezim pengendalian impor. Gula yang diimpor IP hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan industri dari IP tersebut, bukan untuk diperdagangkan.

Kebijakan ini keluar pasca adanya demo dari buruh-buruh pabrik gula pada awal bulan September, yang termuat dalam media surat kabar Suara Merdeka. Aksi demo dari buruh-buruh pabrik gula (PG) se-Jawa

---

<sup>20</sup> Khudori, *op.cit.*, hlm. 51.

Tengah bahkan se-Indonesia itu sangat kompak. Mereka serentak menggelar aksi untuk menyuarkan aspirasi, menyusul kemerebakan peredaran gula impor di Indonesia yang merugikan petani tebu dan pekerja pabrik gula.<sup>21</sup>

Menurut demonstran, gula impor yang masuk ke Jateng sangat merugikan petani tebu dan pekerja pabrik gula. Selain itu menyebabkan gula lokal sulit bersaing dan harga otomatis anjlok. Aksi serupa juga terjadi di empat PG empat kabupaten, yakni Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Mereka berasal dari PG Jatibarang-Banjarnegara (Brebes), PG Pangkah (Slawi), PG Sumberharjo (Pemalang), dan PG Sragi (Kajen) serentak menggelar demo di gedung DPRD masing-masing. Kemudian ratusan pekerja PG Trangkil Pati yang tergabung dalam Forum Solidaritas Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Pabrik Gula Seluruh Indonesia juga menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Setda pada hari Kamis. Mereka sepakat menyerukan hari itu sebagai Hari Keprihatinan Industri Gula Nasional.<sup>22</sup>

Disisi lain bahan baku dari Pabrik Gula milik IT minimal 75 % berasal dari petani. Esensi lainnya yang penting dari kebijakan tersebut adalah bahwa impor gula akan diijinkan apabila harga gula di tingkat

---

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_, *Pekerja Pabrik Gula Serentak Unjuk Rasa*, Jumat 13 September 2002. Tersedia pada <http://HARIAN UMUM SUARA MERDEKA,1.htm>. diakses pada tanggal 17 Februari 2012.

<sup>22</sup> *Ibid*

petani mencapai minimal Rp. 3.100/kg.<sup>23</sup> Dengan syarat agak khusus tersebut, maka hanya Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) IX,X,XI di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta PT Rajawali Nusantara Indonesia yang mampu memenuhi ketentuan tersebut.<sup>24</sup> Pemerintah seakan berharap bahwa kesempatan pelaku usaha tersebut yang mampu menyelamatkan rendahnya produksi dan produktivitas gula di dalam negeri yang sekaligus mensejahterakan petani tebu dan daya saing gula nasional.

Pabrik gula Sumberharjo yang tergabung dalam PTPN Persero IX, juga tetap melaksanakan kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap Industrinya. Walaupun ada sebagian kecil dari kebijakan tersebut terkadang membawa dampak negatif berupa kerugian untuk pabrik gula. Namun selama petani tebu mendapatkan kesejahteraan maka tak mengapa untuk pabrik gula<sup>25</sup>

Dari sisi tataniaga kebijakan penetapan harga diatas memberikan iklim positif bagi produsen. Kebijakan pembatasan impor dilakukan agar harga domestik meningkat karena harga gula relatif lebih rendah dari pada harga domestik sehingga produsen mendapat insentif untuk

---

<sup>23</sup> Sri wahyuni., *op.cit*, hlm. 143.

<sup>24</sup> Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas, hlm. 168.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak H.Maskuri Kepala bagian Gudang terhitung mulai tahun 2012 setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala bagian Keuangan, pada tanggal 26 Januari 2012. Beliau juga pada periode tahun 2012 menjabat sebagai Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) pabrik gula Sumberharjo.

meningkatkan produksinya. Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan tataniaga didukung oleh kebijakan yang lainnya yaitu pada tahun 2002 Departemen Pertanian mencetuskan program akselerasi (peningkatan produksi gula) nasional. Program tersebut dilaksanakan dengan mengoptimalkan kinerja pabrik gula yang ada melalui penataan dan rehabilitasi tanaman, peralatan/mesin pabrik, manajemen pabrik gula, maupun penyehatan lembaga penelitian yang ada (P3GI)<sup>26</sup>

Tabel 10  
Luas Areal Tebu PG Sumberharjo Tahun 2001/2002-2005/2006 dalam Hektar

| Katagori           | Jumlah hektar    |                  |                  |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | 2001/2002        | 2002/2003        | 2003/2004        | 2004/2005        | 2005/2006        |
| TSS I              | -                | -                | 0,414            | 1,939            | 0,840            |
| TSS II             | 0,888            | -                | 3,814            | 1,954            | 3,053            |
| TST I              | -                | 11,591           | -                | -                | -                |
| TST II             | -                | -                | 11,591           | -                | -                |
| TST I              | 47,656           | 48,220           | 37,658           | 49,362           | 50,881           |
| TST II             | 33,668           | 81,323           | 91,665           | 87,532           | 86,940           |
| TSSB               | 31,500           | 10,994           | 4,465            | 6,188            | 4,320            |
| <b>Jumlah TS</b>   | <b>113,712</b>   | <b>152,128</b>   | <b>149,607</b>   | <b>146,975</b>   | <b>146,034</b>   |
| TRS I Km A         | 1.144,759        | 673,316          | 954,772          | 895,521          | 1.205,491        |
| TRS II Km A        | 1.428,379        | 1.235,305        | 1.080,298        | 1.275,560        | 1.019,469        |
| TRT I Km A         | 205,471          | 74,823           | -                | -                | -                |
| TRT II Km A        | 113,224          | 111,769          | -                | -                | -                |
| <b>Jumlah Km A</b> | <b>2.891,833</b> | <b>2.095,213</b> | <b>2.035,070</b> | <b>2.171,081</b> | <b>2.224,960</b> |
| TRS I K            | 1,115            | -                | -                | 29,592           | 22,295           |
| TRS II K           | 15,355           | 40,327           | 79,562           | 114,493          | 321,195          |
| TRT I K            | 66,999           | 124,650          | 115,298          | 127,306          | 226,153          |
| TRT II K           | 376,633          | 332,194          | 482,372          | 484,311          | 347,127          |
| TRT III K          | -                | -                | -                | -                | -                |
| <b>Jumlah Km B</b> | <b>460,102</b>   | <b>497,171</b>   | <b>677,232</b>   | <b>755,702</b>   | <b>916,770</b>   |
| <b>Jumlah</b>      | <b>3.465,647</b> | <b>2.744,512</b> | <b>2.861,909</b> | <b>3.073,758</b> | <b>3.287,764</b> |

Sumber: Arsip PG Sumberharjo Bagian Tanaman

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah areal tebu sendiri (TS) milik pabrik gula Sumberharjo meningkat di tahun 2002/2003 sebesar 38, 416 hektar. Di tahun sebelumnya luas areal tebu sendiri berkisar 113,712 hektar menjadi 152,28 hektar di tahun berikutnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, luas areal tebu milik pabrik gula Sumberharjo semakin menurun.

Tabel 11  
Jumlah Kuintal Gula Kristal tahun 2001/2002-2005/2006

| Katagori           | Jumlah Kuintal Kristal |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2001/2002              | 2002/2003         | 2003/2004         | 2004/2005         | 2005/2006         |
| TSS I              | -                      | -                 | 37,41             | 120,63            | 52,13             |
| TSS II             | 44,92                  | -                 | 205,59            | 151,97            | 174,16            |
| TST I              | -                      | 410,49            | -                 | -                 | -                 |
| TST II             | -                      | -                 | 421,96            | -                 | -                 |
| TST I              | 989,56                 | 2.217,83          | 1.707,84          | 3.150,81          | 1.356,71          |
| TST II             | 767,08                 | 2.207,97          | 4.643,34          | 3.986,81          | 3.041,24          |
| TST III            | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| TSSB               | 750,59                 | 507,36            | 150,05            | 171,33            | 121,57            |
| <b>Jumlah TS</b>   | <b>2.552,15</b>        | <b>5.343,65</b>   | <b>7.166,19</b>   | <b>7.581,55</b>   | <b>4.745,81</b>   |
| TRS I Km A         | 81.353,09              | 54.441,47         | 90.272,46         | 79.049,25         | 94.160,13         |
| TRS II Km A        | 65.928,20              | 74.832,86         | 72.780,68         | 82.241,62         | 56.047,66         |
| TRT I Km A         | 5.692,72               | 3.638,44          | -                 | -                 | -                 |
| TRT II Km A        | 8.584,23               | 4.221,82          | -                 | -                 | -                 |
| <b>Jumlah Km A</b> | <b>161.558,24</b>      | <b>137.134,59</b> | <b>163.053,14</b> | <b>161.290,87</b> | <b>150.207,79</b> |
| TRS I K            | 50,43                  | -                 | -                 | 2.361,27          | 1.196,17          |
| TRS II K           | 510,92                 | 1.938,55          | 5.158,89          | 9.074,21          | 23.999,12         |
| TRT I K            | 1.778,54               | 6.229,24          | 6.784,11          | 9.401,12          | 10.804,98         |
| TRT II K           | 9.941,73               | 16.953,97         | 28.178,12         | 37.209,81         | 28.755,50         |
| TRT III K          | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Jumlah Km B</b> | <b>12.282</b>          | <b>25.122</b>     | <b>40.121</b>     | <b>58.046</b>     | <b>64.756</b>     |
| <b>Jumlah</b>      | <b>176.392</b>         | <b>167.600</b>    | <b>210.340</b>    | <b>226.919</b>    | <b>219.709</b>    |
| Sawah              | 148.638,15             | 131.720,24        | 168.605,08        | 173.170,28        | 175.750,94        |
| Tegalan            | 27.753,85              | 35.879,76         | 41.735,37         | 53.748,55         | 43.958,43         |
| % Sawah            | 84,27                  | 78,59             | 80,16             | 76,31             | 79,99             |
| % Tegalan          | 15,73                  | 21,41             | 19,84             | 23,69             | 20,01             |
| % Km A             | 91,59                  | 81,82             | 77,52             | 71,08             | 68,37             |
| % Km B             | 6,96                   | 14,99             | 19,07             | 25,58             | 29,47             |

Sumber: PG Sumberharjo Bagian Tanaman

## B. Buruh-Buruh Pabrik Gula

Hirarki organisasi tenaga kerja, secara umum dapat dibagi mejadi empat, yaitu administratur, pegawai staf, pegawai non staf, dan buruh/pekerja perkebunan. Masing-masing bagian tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang tegas. Seorang administratur adalah pucuk pimpinan satu unit perkebunan, dan dibantu oleh penasehat dan kontraktor yang masuk pegawai staf. Seorang kontraktor membawahi beberapa kepala bagian dan seorang kepala bagian membawahi seorang asisten yang diberi wewenang di lapangan (lokasi perkebunan). Seorang asisten dibantu oleh beberapa orang mandor yang mengawasi bagian-bagian produksi dan merupakan pegawai non-staf. Hirarki yang paling bawah adalah buruh/pekerja perkebunan.<sup>27</sup>

Hubungan masing-masing tingkat kepegawaian tersebut dipisah dengan jelas dan kaku oleh status dan sistem upah. Seorang buruh/pekerja tidak dimungkinkan menjadi mandor, karena mandor dipilih atas dasar kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Demikian pula, pegawai non-staf menjadi pegawai staf jarang terjadi. Selain itu, hubungan dalam struktur organisasi perkebunan bersifat partenalistik dan otoriter. Struktur organisasi pabrik gula Sumberharjo menggunakan tipe garis dan staff. Pabrik gula Sumberharjo dipimpin oleh administratur yang bertanggung jawab kepada direksi utama yang dibantu oleh beberapa kepala bagian dan staff.

Sebuah Perusahaan atau pabrik, tidak bisa terlepas dari peran para pekerja atau buruh yang ada. Pekerja atau buruh kebun dibagi menjadi buruh

---

<sup>27</sup> Hal ini adalah pandangan dari Mubyarto, dalam bukunya *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan*.

tetap dan musiman. Secara garis besar, karyawan pabrik gula Sumberharjo dibagi menjadi dua yaitu karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Karyawan tetap dikelompokkan menjadi karyawan pimpinan atau karyawan *staff* dan karyawan pelaksana (bulanan). Sedangkan karyawan tidak tetap terdiri dari buruh/ pekerja kampanye, buruh harian lepas, buruh borongan. Pekerja kampanye merupakan pekerja musiman yang didatangkan dan dipekerjakan hanya dalam masa giling saja, kemudian pekerja KKWT atau bisa disebut harian lepas juga pada dasarnya adalah buruh musiman tetapi modelnya menggunakan sistem kontrak, artinya hanya bekerja saat dibutuhkan saja.<sup>28</sup>

Buruh atau pekerja borongan adalah pekerja tidak tetap yang bekerja untuk menyelesaikan suatu hal. Karyawan ini terdiri atas: buruh panggul gula yang berjumlah 35 orang, buruh tebang 1700 orang. Buruh tanaman 8493 orang, supir 92 orang dan warung yang berjumlah 100 orang.<sup>29</sup> Menurut dinamikanya, karyawan pimpinan pabrik gula Sumberharjo pada tahun 2005 dan 2006 berjumlah 30 orang. Baru ditahun 2007 ada penambahan menjadi 31 orang sebelum pada akhirnya di tahun 2008 berkurang menjadi 29. Jumlah yang sama juga terdapat pada tahun 2009 hingga 2011, barulah pada tahun 2012 menjadi 27 orang saja. Sedangkan karyawan pelaksana di tahun 2005 berjumlah 364 orang dan mencapai lonjakan pada tahun 2008 yang berjumlah

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan bapak Heru Pramono kepala bagian Sumber Daya Manusia, tanggal 26 Desember 2012.

<sup>29</sup> Galih Widyatmoko, *op.cit.*, hlm. 12.

382 dan mencapai penurunan drastis di tahun 2012 yang hanya berjumlah 317 orang saja.<sup>30</sup>

Sepanjang pertengahan abad ke-19, di beberapa bagian koloni pabrik-pabrik gula di Jawa mencari sejumlah tenaga kerja di daerah terdekat khususnya pekerja kuasi permanen pada bagian pabrik yang membutuhkan tenaga kerja berpengalaman sangat tinggi. Namun, menjelang dekade-dekade awal abad ke-20 kecenderungan yang selalu ada untuk merekrut tenaga kerja diluar batas terdekat *areaal* pabrik menjadi semakin menonjol. Pada pabrik gula Sumberharjo yang relatif terisolir pada awal 1920-an, para migran ditempatkan dalam “barak-barak kuli” di areal sekitar pabrik.<sup>31</sup> Pada dekade akhir abad ke-19 banyak pabrik gula yang tutup seperti Cepiring di Kendal, Kalibagor di Purwokerto, dan Ceperbaru. Setelah ditutup pekerja-pekerjanya digabung di beberapa pabrik, seperti pekerja pabrik gula Cepiring masuk ke Sragi, sebagian pekerja pabrik gula Kalibagor masuk ke pabrik gula Sumberharjo Purwokerto dekat Pemalang.<sup>32</sup>

Pekerja Kampanye yang ada di pabrik gula Sumberharjo merupakan para buruh yang dipanggil pada saat musim giling yang berlangsung pada bulan ke-5 (Mei) dengan berhak atas jamsostek dan uang pesangon yang juga diikuti sertakan dalam asuransi Jiwasraya. Mengenai pelaksanaan hak-hak

---

<sup>30</sup> Data tersebut diperoleh dari Arsip pada bagian TUK.

<sup>31</sup> J.Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Moderen Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm. 121.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bapak Nurharyanto, pada tanggal 12 Desember 2012 di kantor administrasi PG Sumberharjo Pemalang.



pekerja musiman pada umumnya sebelum pelaksanaan bekerja terjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pekerja-pekerja atau buruh-buruh pabrik terdapat di dalamnya. Untuk masalah kesejahteraan buruh pabrik gula Sumberharjo dinilai paling baik dibandingkan dengan PT atau perusahaan asing maupun swasta lain. Berikut adalah penuturan bapak Suratno mengenai kesejahteraan yang diberikan pabrik gula kepada pekerja:

tunjangan mulai didapat setelah di angkat menjadi pegawai resmi, mulai tahun 2000. Apabila pabrik mengalami hasil maka pekerja mendapatkan jasa produksi, perhitungan anggaran belanja (dana insentif) juga ada. Tidak ada tunjangan istri dan anak. Tetapi dapat anak apabila bersekolah di luar kabupaten pemalang maka mendapat bantuan beasiswa. Yang di dapat setiap bulan dan tetapi bisa di ambil setiap semester. Tunjangan istri hanya dapat tunjangan kesehatan untuk istri dan anak yang belum menikah dpat tunjangan kesehatan yang ditanggung oleh pabrik gula dan dibatasi 3 anak saja.

Bersama itu, pabrik gula Sumberharjo telah menyediakan pemondokan “barak-barak kuli” yang dapat dihuni oleh para buruh dan keluarganya. Mereka tinggal di dalam kompleks perusahaan. Tetapi ada juga diantara mereka yang tinggal diluar komplek perusahaan karena telah mempunyai rumah huni tersendiri.<sup>33</sup> Berdasarkan jarak tempat tinggal dan perusahaan maka transportasi tidak menjadi kendala bagi para buruh selain itu terdapat transportasi angkutan umum yang menjangkau pedesaan itu meski harus dilalui dengan jalan yang berlubang tak karuan.

Pemondokan yang disediakan oleh pabrik gula Sumberharjo itu sendiri dari tiga kelompok, hal ini dapat dilihat dalam peta Lay Out (denah) PG

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara buruh pabrik gula Sumberharjo, bapak Suprayitno yang bekerja dari tahun 1993 hingga sekarang pada tanggal 28 Desember 2012.

Sumberharjo. Ketiga kelompok pemondokan ini terdapat tidak jauh dari kompleks lokasi pabrik gula Sumberharjo. Kelompok pertama berada di dekat kantor administrasi yaitu bagian barat musholla dan kelompok kedua berada dibagian utara lapangan tenis dan gedung pertemuan dan kelompok terakhir juga berada di kompleks pabrik gula yaitu di dekat timbangan truk dan lori tebu tepatnya di sebelah utaranya. Dalam wawancara dengan salah seorang buruh penghuni pemondokan pabrik gula Sumberharjo menjelaskan:

Jumlah RW, satu RW ada 3 RT, untuk RW 07 terdiri atas RT 04,05 dan 06. Yang menempati rumah dinas karyawan pelaksana ya paling jauh ya Pemalang, kecuali karyawan pimpinan ada yang dari Solo, Semarang, Yogyakarta. Pekerja Harian lepas dan kampanye pemanggilan kerja kalau pabrik gula mau giling, lewat surat undangan dan lewat radio.<sup>34</sup>

Di wilayah sekitar pabrik gula yaitu di dekat administrasi juga terdapat Taman Kanak-Kanak “17 Teladan” yang dikelola oleh PTPN IX (PERSERO) pabrik gula Sumberharjo Pemalang, kesemuanya adalah peran dari Organisasi Darmawanita pabrik gula Sumberharjo yang sekarang mengelola taman kanak-kanak itu. Dan biaya masuk dan bulannya juga relatif murah sehingga tak jarang anak-anak dari pekerja-pekerja pabrik gula Sumberharjo bersekolah di TK itu.

Upah minimum mulai ada dari pemerintah mulai ada dari tahun 2000, tahun sebelumnya hanya menggunakan prosestasi pabrik saja. Dana pensiun juga mulai ada sekitar tahun 2000 dan sebelumnya tidak ada dana pensiun

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Suprayitno, buruh pabrik pabrik gula Sumberharjo yang ikut menempati “barak-barak kuli”. Pada tanggal 28 Januari 2013.

hanya pabrik gula Sumberharjo menerapkan sistem pesangon.<sup>35</sup> Berikut adalah gambaran mengenai upah buruh-buruh pabrik PKWT Kampanye pabrik gula Sumberharjo:

Tabel 12  
Penyesuaian Upah Pekerja PKWT Kampanye PG Sumberharjo

| No | Lama (tahun 2005) |                | Penyesuaian tahun 2006 |
|----|-------------------|----------------|------------------------|
|    | Setara Gol/MKG    | Upah per bulan | Upah Perbulan          |
| 1  | 2                 | 3              | 4                      |
| 1  | IA/0              | 440.000        | 530.347                |
| 2  | IA/1              | 442.035        | 532.381                |
| 3  | 1A/2              | 444.069        | 532.381                |
| 4  | 1A/3              | 446.104        | 532.381                |
| 5  | 1A/4              | 448.139        | 534.416                |
| 6  | 1A/5              | 450.173        | 534.416                |
| 7  | 1A/6              | 452.208        | 534.416                |
| 8  | 1A/7              | 454.243        | 536.451                |
| 9  | 1A/8              | 456.277        | 536.451                |
| 10 | 1A/9              | 458.312        | 536.451                |
| 11 | 1A/10             | 460.347        | 538.485                |
| 12 | 1A/11             | 462.381        | 538.485                |
| 13 | 1A/12             | 464.416        | 538.485                |
| 14 | 1A/13             | 466.451        | 540.520                |
| 15 | 1A/14             | 468.485        | 540.520                |
| 16 | 1A/15             | 470.520        | 540.520                |

MKG : Masa Kerja Golongan

Sumber: Arsip PG.Sumberharjo 2006-2007

Bagi pekerja/buruh, upah merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu untuk meningkatkan taraf hidupnya upah perlu naik dari waktu ke waktu. Dan bagi pengusaha/ perusahaan, upah merupakan biaya produksi dan seharusnya

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Suratno mantan Buruh Parabrik Gula Sumberharjo bagian instalasi pada tanggal 11 Desember 2012.

dilihat juga sebagai investasi yang akan dikembalikan oleh pekerja/buruh dalam bentuk produktivitas.

Pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Begitu juga pekerja/ buruh pabrik Gula Sumberharjo memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam serikat buruh pabrik yang sekarang di sebut dengan SP-Bun (Serikat Pekerja Perkebunan). Perkembangan serikat buruh di Sumberharjo memang tergolong lambat karena sebelum tahun 2000, mereka masih di atur menejemen dalam masalah upah. Berbeda dengan masa sekarang yang menjadikan peran aktif dari buruh-buruh pabrik untuk menyalurkan aspirasinya, terkhusus dalam masalah keuangan pribadi mereka yaitu upah.

Sering tidak diikutsertakannya kaum miskin (buruh-buruh) secara demokratis dalam mengambil keputusan itulah menurut Cahn Bersaudara merupakan sebab kegagalan program melawan kemiskinan. Terdapat persamaan dengan analisis terhadap serikat-serikat buruh yang dilakukan oleh Michels. Organisasi birokratis yang dibentuk untuk melaksanakan program melawan kemiskinan memperlemah kaum miskin untuk mempengaruhi program tersebut. Demikian pula, birokratisasi terhadap serikat-serikat buruh telah memperlemah tokoh-tokoh buruh dalam upaya

mempengaruhi serikat-serikat buruh mereka, meskipun hal tersebut membantu kaum buruh mencapai sasaran-sasaran ekonomi mereka.<sup>36</sup>

Birokrasi merupakan struktur hierarkis dimana kekuasaan mutlak berada di puncak, dan sementara sebagian terdesentralisasi pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Setidaknya keadaan seperti ini juga terjadi di pabrik gula Sumberharjo sendiri. Banyak kaum pekerja/ buruh menyatakan ikut dalam Serikat pekerja atau dalam PTPN IX Persero ini disebut dengan SP-Bun, akan tetapi pada prakteknya mereka tidak tahu menahu akan kegiatan di dalamnya. Sehingga tokoh-tokoh buruh jarang terlihat keluar dan seakan mati keeksistensiannya. Hanya yang mereka tahu bahwa SP-Bun bertugas untuk menjembatani para pekerja untuk menyalurkan aspirasi mereka seperti meminta kenaikan upah, usul dan sebagainya.<sup>37</sup>

Buruh-buruh pabrik gula Sumberharjo mengaku dalam serikat pekerja hanya berperan dalam rapat koordinasi masalah pekerjaan saja atau teknis, apabila sudah menyangkut masalah anggaran, mereka tidak tahu menahu masalah tersebut. Sedangkan SP-Bun bertugas menyalurkan seetiap keresahan dari buruh pabrik yang kemudian di usulkan kepada dewan

---

<sup>36</sup> Peter M. Blau dan Mrshall W Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, penerjemah Garry R.Jusuf, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 157.

<sup>37</sup> Seperti wawancara dengan pekerja-pekerja buruh Pabrik Gula Sumberharjo yaitu bapak Rasbianto sebagai satpam, bapak Teguh Imam bagian gilingan dan bapak Prayitno bagian Listrik pada tanggal 28 Desember 2012, yang mengungkap hal yang sama ketika di tanya mengenai perasn pekerja dalam SP-Bun.

dereksi.<sup>38</sup> Peran buruh dalam SP-Bun itu cenderung pasif, para buruh hanya diikutsertakan ketika ada pemilihan pemimpin SP-Bun pabrik gula Sumberharjo, tetapi untuk koordinasi yang dilakukan kepada mereka adalah jarang. Jadi buruh hanya berpartisipasi pada rapat pemilihan ketua kemudian ikut memilih, dan hanya menerima hasilnya saja. Mayoritas yang duduk dalam organisasi SP-Bun pabrik gula Sumberharjo adalah karyawan pelaksana.<sup>39</sup>

Namun di tahun 1998, di pabrik gula Sumberharjo belum ada serikat pekerja/buruh, meskipun sebenarnya serikat buruh di Indonesia telah lahir tahun 1879 ialah Serikat Buruh Guru Hindia Belanda. Setelah itu lahir Serikat Buruh Pos di tahun 1905, barulah Serikat Buruh Perkebunan dan Serikat Buruh Gula berdiri di tahun 1906 yang beranggotakan pekerja/buruh Belanda.<sup>40</sup> Sepertinya semangat mendirikan Serikat pekerja di pabrik gula Sumberharjo agak terlambat, atau memang aspirasi mereka seperti dirantai oleh rezim Orde Baru. Sehingga serikat Buruh di pabrik gula Sumberharjo dimulai keeksistensiannya sejak tahun 2000.

Gerakan buruh pabrik gula Sumberharjo juga dirasa ada pada masa-masa itu, pada surat kabar Suara Merdeka tahun 2000 memberitakan bahwa ratusan karyawan pabrik gula demo ke DPRD. Kemudian berlanjut di tahun

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Rasbianto dan Teguh Imam tanggal 28 Desember 2012.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Adi Setiawan yang bekerja di bagian tanaman pabrik gula Sumberharjo pada tanggal 26 Desember 2012.

<sup>40</sup> Suwanto, *Hubungan Industrial dalam Praktek*, Jakarta: Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII), 2006, hlm. 74.

2002 yaitu ketika diterapkannya kebijakan impor gula maka secara serentak buruh-buruh pabrik gula se Jawa tengah dan Indonesia berdemo. Seperti yang telah disebutkan diatas. Demo tersebut ada keterkaitan dengan pemberitaan pabrik gula Sumberharjo yang merugi, hal tersebut juga termuat pada media surat kabar suara merdeka. Disebutkan bahwa peredaran gula impor yang merebak di pasaran akhir-akhir ini berdampak negatif bagi pabrik gula Sumberharjo, Pemalang. Perusahaan milik negara itu kini rugi sekitar Rp 13 miliar. Dikhawatirkan bila tidak cepat diatasi, pabrik akan kolaps dan ratusan karyawan di-PHK. Berikut perkataan Administratur PG Sumberharjo Drs Suparno BSc sehari sebelum keluarnya berita:

Kami sangat prihatin atas merebaknya peredaran gula impor di pasaran. Bila pemerintah tidak cepat mengatasi hal itu, PG kami bisa kolaps dan karyawan dapat di-PHK.

Perkembangan kehidupan pabrik gula yang memprihatinkan itu mulai terasa sejak diterapkan aturan bebas bea masuk gula impor oleh pemerintah pusat. Gula impor berjenis *raw sugar* (gula mentah) yang seharusnya dimasak lagi langsung dilempar ke pasaran. Harganya pun murah dan mematikan pasaran gula lokal.<sup>41</sup> Harga lelang gula pabrik gula beberapa tahun ini terus merosot. Tahun 2001 seharga Rp 320.000,00 hingga Rp 360.000,00 /kuintal. Tahun ini berkisar Rp 261.000,00 sampai Rp 262.000,00 /kuintal. Itu belum termasuk inklusif PPN 10%. Harga pokok di tingkat konsumen untuk gula lokal Rp 3.100,00/kg. Gula impor Rp 2.600,00. Karena murah, konsumen

---

<sup>41</sup> sf-20c, "Peredaran Gula Impor: PG Sumberharjo Rugi Rp.13 M", Jawa Tengah, Pemalang: *Suara Merdeka*, (Kamis 12 September 2002).

terpikat. Padahal, gula impor belum siap dikonsumsi dan berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Penurunan harga gula lokal juga akibat impor gula melebihi kebutuhan dalam negeri.

Suparno cemas bila fenomena itu tidak cepat diatasi oleh pemerintah, dalam waktu dekat pabrik gula Sumberharjo akan kolaps dan berimbas pada ratusan, bahkan ribuan tenaga kerja. Kendati sejauh ini belum ada karyawan pabrik gula yang di-PHK, penambahan karyawan sudah distop. Keprihatinan itu merambah pula di tingkat petani. Terbukti, belakangan ini di wilayah pabrik gula Sumberharjo banyak lahan tebu yang siap tebang mengalami kebakaran. Disinyalir kebakaran disengaja karena petani frustrasi.<sup>42</sup>

Disebutkan, dalam musim tanam 2002 jumlah lahan tebu yang terbakar seluas 400 hektare, tersebar di wilayah Pemalang antara perbatasan Tegal sampai perbatasan Kabupaten Pekalongan. Kerugian akibat kebakaran per hektare Rp 6 juta. Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Pekerja (SP) pabrik gula Sumberharjo Harmianto.

Bila pemerintah pusat tidak cepat menyelamatkan kehidupan PG, karyawan akan menderita. Sebab, mereka akan terancam PHK apabila PG kolaps atau gulung tikar. Rencananya Kamis tanggal 12 September ini karyawan PG akan demo ke Bupati dan DPRD. Kami akan membawa 200 karyawan untuk beraudiensi dengan Bupati dan DPRD. Diharapkan hal itu menjadi perhatian pemerintah daerah atau pusat.

Kondisi yang sama juga terjadi pada pabrik-pabrik gula di Jawa Tengah, bahkan kondisi pabrik gula Pangka lebih memprihatinkan. Pihak manajemen perusahaan tidak bisa lagi bertahan dalam kondisi harga gula di

---

<sup>42</sup> sf-20c, "Peredaran Gula Impor: PG Sumberharjo Rugi Rp.13 M", Jawa Tengah, Pemalang: *Suara Merdeka*, (Kamis 12 September 2002).



pasaran merosot tajam.<sup>43</sup> Biaya ongkos produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, hal ini termuat dalam berita surat kabar yang sama. Gerakan buruh juga masih eksis sampai tahun 2005, khususnya di pabrik gula Sumberharjo. Demo menuntut tunjangan kemahalan terjadi juga di pabrik gula daerah lain, seperti pabrik gula Jatibarang (Brebes), pabrik gula Sumberharjo (Pemalang), dan pabrik gula Sragi (Pekalongan). Tuntutan yang diajukan juga serupa. Tuntutan karyawan bagi tunjangan kemahalan adalah Rp 200.000,-. Terhadap angka tersebut, direksi terus berupaya menurunkannya hingga angka terendah.<sup>44</sup> Akhirnya pihak direksi yang diwakili Direktur SDM dan Umum Th A Wahjudjati STP memberikan persetujuan: nilai tunjangan yang harus dibayarkan adalah Rp 125.000,-. Kartono Ketua (SP-Bun) PTPN IX menuturkan bahwa untuk mencapai nilai itu pun seperti mengemis, sebelumnya direksi hanya mau memberikan Rp 112.500,-.

Kemudian di tahun 2006 karyawan pabrik gula Sumberharjo Pemalang kembali bergerak dengan mempertanyakan dana jasa produksi (japrod) tahun 2005 setelah mereka mendengar kabar bahwa dana tersebut hanya diberikan seperempat gaji pokok yang seharusnya diberikan 3,25 kali gaji pokok.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> G12-20e, "PG Pangka Terancam Gulung Tikar: Harga Gula di Pasaran Merosot". Jawa Tengah, Slawi: *Suara Merdeka*, (Kamis, 12 September 2002).

<sup>44</sup> Riyono Toepra-58, "Kaya Nganyang Lombok. Wakare...!", Pantura: *Suara Merdeka*, (Senin, 24 Oktober 2005).

<sup>45</sup> sf-58, "Dana Jasa Produksi PG tetap 3,25 Kali Gaji Pokok", Pemalang: *Suara Merdeka*, (Rabu, 26 April 2006).